

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, khususnya dalam menganalisis hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan pada suatu negara atau wilayah. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh bila produksi barang dan jasa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada sejauh mana kegiatan ekonomi menghasilkan tambahan pendapatan atau kekayaan bagi masyarakat selama periode waktu tertentu. Terus membaiknya pertumbuhan ekonomi suatu negara atau wilayah menunjukkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berjalan baik (Hasiru *et al.*, 2024).

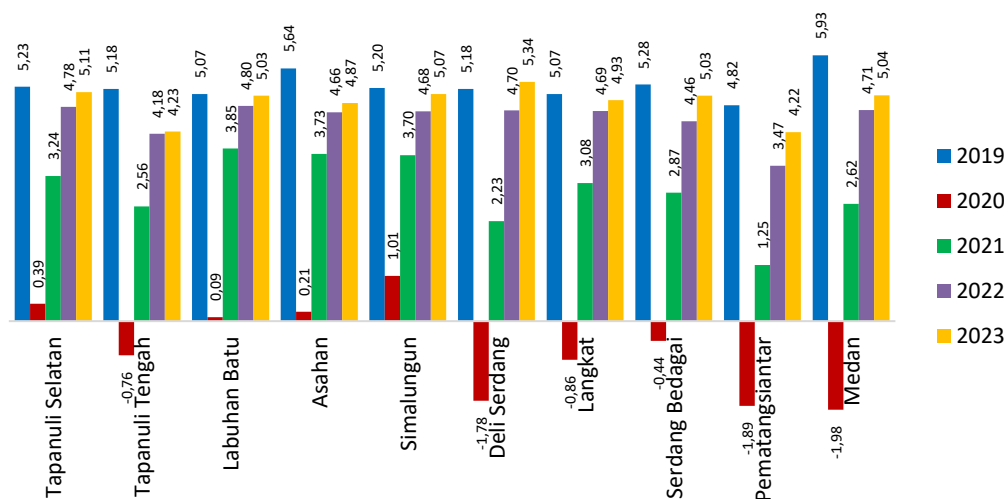
Pembangunan ekonomi pada hakekatnya merupakan serangkaian usaha kebijakan dengan tujuan yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dalam suatu negara (Doni, 2022). Salah satunya yaitu Indonesia. Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 1.904.569 km², serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara berpenduduk terbanyak ke-4 di dunia dengan penduduk mencapai 275.344.166 jiwa pada tahun 2022.

Indonesia merupakan negara yang berkembang memiliki 38 provinsi yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan keindahan alam serta sumber daya yang melimpah dapat dikelola dengan baik untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Salah satu dari ke 38 provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yaitu sebanyak 15,39 juta jiwa, dimana dengan jumlah penduduk yang banyak diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis provinsi Sumatera Utara terletak pada 1° - 4° LU dan 98° - 100° BT, dengan luas daratan 71.680 km². Dimana sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Aceh, disebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka, disebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat dan disebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia.

Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara menempati posisi ke tiga dari 10 provinsi di Pulau Sumatera yaitu peringkat pertama Provinsi Kepulauan Riau dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20 persen, kedua Sumatera Selatan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,08 persen dan ketiga Sumatera Utara dengan pertumbuhan ekonominya sebesar 5,01 persen. Selanjutnya Jambi dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,66 persen, Sumatera Barat dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,62 persen, Lampung dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,55 persen, Kepulauan Bangka Belitung dengan pertumbuhan ekonominya sebesar 4,38 persen, Bengkulu dengan pertumbuhan ekonominya sebesar 4,26 persen, Aceh dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,23 persen dan Riau dengan pertumbuhan ekonominya sebesar 4,21 persen.

Karakteristik perekonomian Sumatera Utara masih didominasi oleh pertanian, kehutanan dan perikanan yang memberikan kontribusi sebesar 23,59 persen, diikuti oleh perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 19,08 persen, industri pengolahan sebesar 18,44 persen, konstruksi sebesar 13,20 persen, serta transportasi dan pergudangan sebesar 5,05 persen. Dapat dikatakan bahwa sektor yang paling banyak berkontribusi dalam PDRB Provinsi Sumatera Utara ialah pertanian, kehutanan dan perikanan. Berikut data pertumbuhan ekonomi 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023:



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Utara (Data diolah 2025)

Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan yang sangat drastis bahkan beberapa daerah mengalami

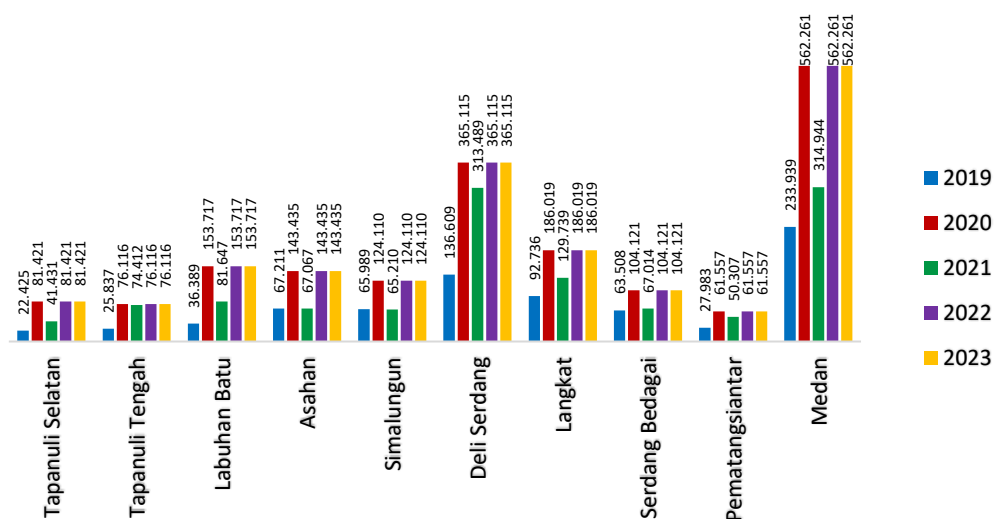
pertumbuhan negatif. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2021 – 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Labuhan Batu sebesar 3,85 persen pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar 4,80 persen, daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Kota Pematangsiantar sebesar 1,25 persen pada tahun 2021 dan 3,47 persen pada tahun 2022. Selanjutnya di tahun 2023 daerah yang pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Deli Serdang sebesar 5,34 persen dan terendah pada kota Pematangsiantar sebesar 4,22 persen.

Penurunan pertumbuhan ekonomi di 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada beberapa lapangan usaha. Penurunan yang cukup tajam ini menunjukkan betapa besar dampak pandemi terhadap aktivitas ekonomi, terutama di sektor – sektor jasa dan perdagangan yang sangat terdampak pembatasan sosial. Meskipun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 - 2023 mengalami peningkatan namun masih terdapat pertumbuhan ekonomi yang peningkatannya lambat. Faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti struktur ekonomi daerah, ketahanan sektor usaha, dan kebijakan pemerintah daerah menjadi penentu utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Penyumbang perekonomian urutan ke lima dari sektor UMKM diduduki oleh Provinsi Sumatera Utara. Dimana peringkat pertama Jawa Barat, posisi kedua Jawa Tengah, posisi ketiga Jawa Timur dan Posisi keempat DKI Jakarta (Yolanda, 2024). Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting bagi daerah, terutama sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Kegiatan Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu cara agar produk kreatif dari daerah dikenal dan memberikan peluang usaha bagi pelaku daerah. Tidak hanya itu, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian negara, khususnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara. Pasalnya, peran UMKM dinilai sangat penting dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan meningkatkan perekonomian daerah (Halim, 2020).

Kehadiran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berperan besar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi serta menyediakan sumber pendapatan bagi masyarakat lokal untuk mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi (B. Y. P. Simangunsong, 2022). Berikut data jumlah UMKM 10 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023 :



Sumber : Open Data Provinsi Sumatera Utara (Data diolah 2025)

Gambar 1.2 Jumlah UMKM 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023 (Unit)

Berdasarkan gambar 1.2 di atas menunjukkan jumlah UMKM 10 Kabupaten/Kota dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2019 – 2023 mengalami

fluktuasi. Pada tahun 2020 tercatat mengalami peningkatan, dimana daerah yang UMKM tertinggi terjadi Kota Medan 562. 261 unit dan terendah terjadi pada daerah Pematangsiantar sebesar 61.557 unit. Peningkatan jumlah UMKM pada tahun 2020 merupakan reaksi terhadap pandemi Covid – 19. Banyak individu beralih ke sektor UMKM sebagai pilihan untuk mendapatkan penghasilan di tengah terbatasnya kesempatan kerja.

Dengan bertambahnya jumlah UMKM maka jumlah barang dan jasa yang dihasilkan juga akan meningkat. Sehingga menciptakan lapangan kerja dan memberikan peluang UMKM untuk tumbuh dan berkembang (R. Aulia, 2021). Meskipun memiliki potensi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM masih menghadapi berbagai kelemahan, baik dari dalam maupun luar, seperti keterbatasan sumber daya manusia, strategi pemasaran yang kurang efektif, akses terhadap modal yang terbatas, kondisi lingkungan bisnis yang tidak mendukung, dan penggunaan teknologi yang belum optimal (Azhari, 2018).

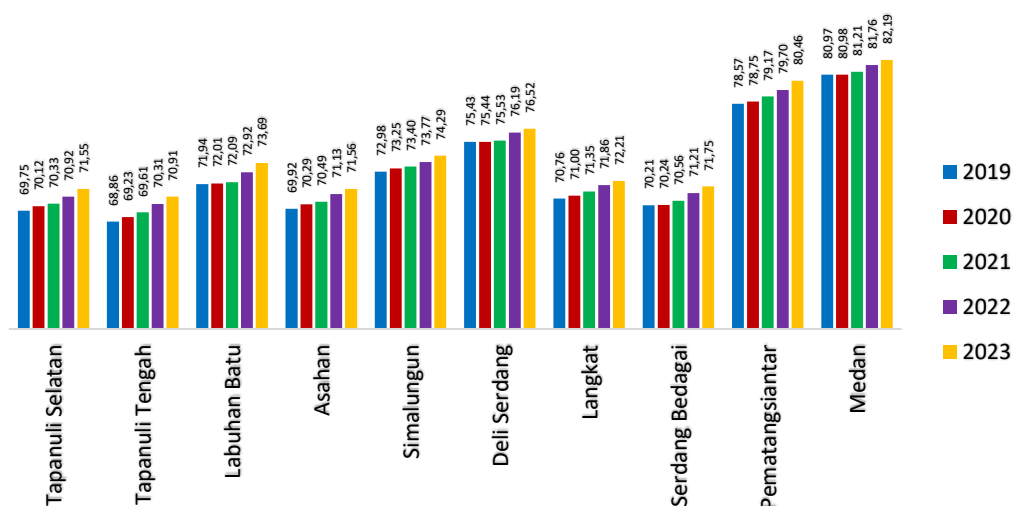
Untuk itu perlu adanya dukungan digitalisasi sehingga produk UMKM mampu bersaing di era global saat ini. Melalui program pelatihan dan pendampingan yang fokus pada penerapan teknologi digital, seperti kerjasama dengan platform e-commerce, UMKM dapat mengoptimalkan efisiensi operasional mereka, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas akses ke pasar. Kebijakan ini diperkuat dengan berbagai inisiatif lain, seperti promosi produk melalui bazar dan pameran, serta penyediaan fasilitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemasan dan branding.

UMKM memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan usaha besar yang lebih mengandalkan modal dan membutuhkan tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan serta pengalaman tertentu, sehingga tidak mampu menyerap seluruh pencari kerja, terutama yang berpendidikan rendah. Sementara itu, UMKM justru lebih fleksibel dalam menerima tenaga kerja dari berbagai latar belakang pendidikan dan keterampilan, sehingga mampu menjadi solusi utama dalam mengurangi pengangguran dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat luas. Dengan demikian, pengembangan UMKM menjadi salah satu strategi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan kesempatan kerja di tengah pertumbuhan penduduk yang besar (Arifudin *et al.*, 2020).

Kualitas sumberdaya manusia (SDM) menjadi aspek penting dalam pengembangan UMKM. Kualitas manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan tingkat pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang memengaruhi produktivitas dan inovasi pelaku UMKM. Para pelaku UMKM memerlukan pelatihan yang lebih intensif di bidang manajerial keuangan, dan pemasaran agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Tingkat kualitas sumber daya manusia berhubungan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Taraf kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui kualitas dari sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan guna mencapai kehidupan yang sejahtera harus dapat mengoptimalkan kemampuan dan potensi dari sumber daya manusia (Asnidar, 2018).

Salah satu cara untuk mengukur kualitas manusia suatu negara atau wilayah adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dikenal sebagai *Human Development Index* (HDI). Point utama dari IPM berupa usia penduduk, kemampuan dan pengetahuan yang ditinjau dari melek aksara dan rata-rata tingkat pendidikan tingkat kelayakan hidup yang diukur dari PDRB per kepala berdasarkan standar daya beli masyarakat (Dhiaulhaq Luqyana Nizhamul, Vedelya Istighfarah, 2023). Berikut data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 10 Kabupaten/Kota dari tahun 2019 – 2023 di Provinsi Sumatera Utara dalam satuan persen :



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara (Data diolah 2025)

Gambar 1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 10 Kabupaten/Kota Tahun 2019 – 2023 (Persen)

Dapat dilihat dari gambar diatas menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun hampir di 10 Kabupaten/Kota. Hal menunjukkan adanya perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat. Kota Medan selaku mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi dari 80,97 persen pada

2019 meningkat menjadi 82,19 persen pada 2023 dan Indeks Pembangunan Manusia terendah terjadi pada Tapanuli Tengah sebesar 68,86 persen pada 2019 dan 70,91 persen pada tahun 2023. Peningkatan ini dapat dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi kota yang pesat, didorong oleh sektor jasa, perdagangan, dan industri yang berkembang pesat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, karena kualitas sumber daya manusianya lebih baik, yang pada gilirannya mendorong produktivitas dan inovasi di berbagai sektor ekonomi (Wididarma & Jember, 2021). Hal ini dapat dilihat di 10 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara mengalami peningkatan dari indeks pembangunan manusia diikuti dengan pertumbuhan ekonomi juga meningkat di 10 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah seringkali menjadi patokan utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan tersebut mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka dianggap bahwa pembangunan ekonomi di suatu negara atau daerah telah berhasil. Namun, dalam kenyataannya, seringkali terjadi kondisi yang bertolak belakang, yaitu meskipun pertumbuhan ekonomi mencapai angka yang tinggi, kesejahteraan masyarakat masih rendah (Bawowo *et al.*, 2022).

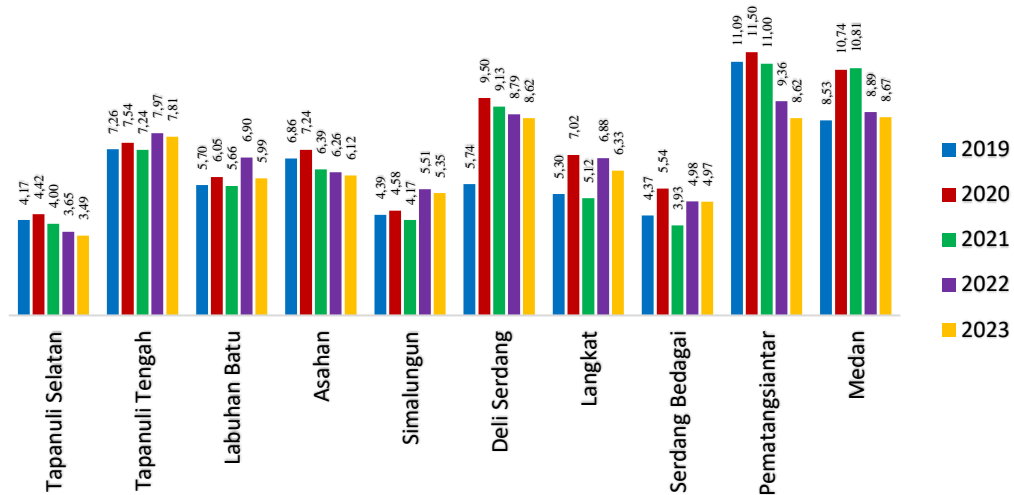
Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah umumnya menghadapi tantangan terkait akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang berdampak pada lambatnya perkembangan ekonomi lokal. Dengan kualitas hidup yang lebih baik, masyarakat dapat lebih produktif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi global, sehingga Sumatera Utara dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Rendahnya sumber daya manusia dalam suatu daerah mengakibatkan terjadi pengangguran yang tinggi. Sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah tersebut (Permadhy & Sugianto, 2020). Pengangguran selalu menjadi masalah yang sulit dipecahkan. Dimana setiap tahunnya jumlah penduduk terus bertambah. Seiring bertambahnya jumlah penduduk setiap tahun, jumlah pencari kerja juga meningkat, dan jumlah orang yang bekerja juga meningkat.

Apabila seorang pekerja tidak dapat menerima pekerjaan, maka pekerja tersebut digolongkan sebagai pengangguran (Ronaldo, 2019). Jumlah tenaga kerja yang meningkat disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk, jika jumlah penduduk meningkat tentu mempengaruhi adanya tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka, merupakan persentasi jumlah pengangguran dibagi total angkatan kerja. Dikatakan angkatan kerja dimana pada umur lebih dari 15 tahun sampai dengan umur 64 tahun.

Berikut data Tingkat Pengangguran 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Utara pada priode tahun 2019 – 2023 :



Sumber : Badan Pusat Statistik(BPS) Provinsi Sumatera Utara,(Data diolah 2025)

Gambar 1.4 Tingkat pengangguran 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara 2019 -2023

Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa Tingkat pengangguran di Sumatera Utara dalam waktu 5 tahun terakhir yaitu tahun 2019 – 2023 cenderung mengalami fluktuasi di setiap daerah, yang erat kaitannya dengan perubahan kondisi ekonomi baik secara nasional maupun regional. Pada tahun 2020, hampir seluruh daerah mengalami lonjakan tingkat pengangguran yang cukup signifikan. Salah satu daerah yang mengalami tingkat pertumbuhan tertinggi yaitu Pematangsiantar sebesar 11,50 persen dan terendah pada daerah Tapanuli Selatan sebesar 4,42 persen. Pada tahun selanjutnya yaitu 2021-2023 tingkat pengangguran mengalami penurunan pada 10 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh negatif terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, artinya ketika pengangguran meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan menurun (Jeray *et al.*, 2023). Hal ini sejalan pada grafik 10 Kabupaten/Provinsi Provinsi Sumatra Utara yakni dimana pada tahun 2020 tingkat pengangguran meningkat di pada seluruh 10 Kabupaten/Kota diikuti dengan pertumbuhan ekonomi menurun pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu faktor yang menyebabkan Tingkat pengangguran terbuka mengalami peningkatan karena terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 yang sangat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat di dunia, termasuk Indonesia dan berdampak pada setiap provinsi.

Tingginya tingkat pengangguran pada suatu daerah menggambarkan ketidakberhasilan dalam proses pembangunan di suatu wilayah, karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan peluang pekerjaan yang ada. Hal ini dapat mengganggu stabilitas nasional suatu negara, hal ini dikarenakan pengangguran menyebabkan sebagian rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumsi mereka karena tidak memiliki pekerjaan dan pendapatan Novitasari (2019) dalam (Mataheurilla & Rachmawati, 2021).

Pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan berbagai masalah dalam bidang ekonomi dan sosial. Karena tidak memiliki penghasilan, para pengangguran terpaksa mengurangi pengeluaran mereka, yang dapat memengaruhi pendapatan asli daerah. Selain itu, jumlah pengangguran yang banyak juga berpotensi meningkatkan kriminalitas serta berbagai masalah sosial lainnya (I. A. Putri & Soesatyo, 2016). Dengan tingginya tingkat pengangguran menggambarkan bahwa

adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan penduduk yang sedang mencari pekerjaan dengan lapangan kerja yang sedikit. Hal ini salah satu faktor dari gambaran kurangnya keberhasilan dari proses pembangunan dalam suatu wilayah, karena tidakseimbang baik dari kuantitas angkatan kerja dengan lapangan pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Sumatera Utara masih menghadapi banyak tantangan, terutama dalam kontribusi UMKM. Jumlah UMKM yang meningkat tidak berbanding lurus dengan kemajuan ekonomi karena mereka mengalami masalah dalam akses permodalan, adopsi teknologi yang masih rendah, dan akses ke pasar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga tidak merata, dengan Kota Medan memiliki IPM tinggi 82,19 sementara Kabupaten Labuhanbatu Utara hanya 73,69 menggambarkan ketimpangan dalam pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka masih tinggi, terutama di Kota Medan dengan TPT 8,67 mengindikasikan kurangnya penyerapan tenaga kerja. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengaruh UMKM, IPM, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 kabupaten/kota untuk mendukung kebijakan yang tepat dan berbasis data.

Sejauh ini telah banyak penelitian mengenai jumlah UMKM, Kualitas Penduduk yang berkaitan dengan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan Yusrizal *et al.* (2023) menunjukkan bahwa jumlah umkm tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota Langsa. Pada penelitian yang dilakukan Prassetyo *et al.* (2022) jumlah UMKM bahwa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada Penelitian

yang dilakukan Imnur *et al.* (2023) menunjukkan bahwa jumlah umkm signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian Sari & Fisabilillah (2021) menunjukkan bahwa pengaruh UMKM pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000 sampai 2019 memiliki nilai yang negatif tidak signifikan yang berarti menurunnya pertumbuhan UMKM mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antar variabel UMKM dan pertumbuhan ekonomi yang menyatakan pengaruh yang negatif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.

Selanjutnya penelitian Muqorrobin & Soejoto (2017) menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya pada penelitian Anisa *et al.*, (2024) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dalam penelitian Banase (2025) Hasil analisis menunjukan bahwa IPM secara signifikan mempengaruhi PDRB dan tingkat pengangguran mempengaruhi PDRB secara signifikan.

Peneliti memilih Provinsi Sumatera Utara sebagai objek penelitian karena, Provinsi Sumatera Utara menempati posisi ketiga dengan penyumbang pertumbuhan ekonomi setelah Provinsi Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan. Selain itu Provinsi Sumatera Utara juga menduduki urutan ke lima penyumbang perekonomian dari sektor UMKM. Dimana peringkat pertama Jawa Barat, kedua Jawa Tengah, ketiga Jawa Timur dan keempat Jawa Barat. Selain itu, pemilihan 10 Kabupaten/Kota sebagai objek penelitian didasarkan pada rata – rata jumlah

UMKM yang tertinggi dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Dengan cara menghitung jumlah UMKM dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara selama kurun waktu 5 tahun kemudian membaginya dengan 165 observasi sehingga memperoleh rata – rata UMKM 64.165 unit.

Sudah banyak penelitian yang meneliti pengaruh jumlah UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi atau meneliti tentang tingkat pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Namun dalam penelitian ini menganalisis Pengaruh Jumlah UMKM, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara dengan menggunakan data 10 Kabupaten/Kota dengan Jumlah UMKM Tertinggi dalam jangka waktu 5 tahun yaitu dari tahun 2019 – 2023. Dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode analisis data panel. Data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Data *time series* merupakan data yang terdiri dari beberapa periode waktu, seperti data harian, bulanan, atau tahunan, sementara data *cross section* atau data silang merupakan data dengan mengamati banyak hal pada titik waktu yang sama atau memperhatikan perbedaan waktu.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang tersebut maka penulis ingin mengkaji penelitian ini dengan mengangkat judul “**Analisis Pengaruh Jumlah UMKM, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 10 Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Jumlah UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Kabupaten/Kota di Sumatra Utara?
2. Seberapa besar pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi 10 Kabupaten/Kota di Sumatra Utara?
3. Seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Pertumbuhan Ekonomi 10 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara?
4. Seberapa besar pengaruh Jumlah UMKM, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi 10 Kabupaten/Kota di Sumatra Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi 10 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
2. Mengetahui seberapa besar pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara
3. Mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi 10 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

4. Mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah UMKM, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi 10 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai UMKM serta memberikan sumbangan informasi ilmu yang dapat memberikan kontribusi dalam memajukan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai kewirausahaan.
2. Memberikan gambaran kepada pembaca mengenai bagaimana UMKM, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi terutama pengaruh pada setiap variabel bebas dan variabel terikat.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sumatra Utara : hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan dalam pengembangan UMKM, Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengurangi tingkat pengangguran guna meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatra Utara.
2. Bagi penelitian selanjutnya dapat menjadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut lagi, serta menambah variabel lainnya